



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

**Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Jl. Letkol Pol Toegino Komplek Perkantoran Kuala Tungkal**

KATA PENGANTAR

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mempunyai tugas mengkoordinir, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanaan Aparatur Negara bahwa setiap instansi pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2024

menyusun LKjIP.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain sebagai kewajiban tersebut diatas, juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
2. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Demikian LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 kami laporkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, Januari 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	1
C. Permasalahan Utama dari Organisasi.....	1
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
E. Struktur Organisasi.....	5
F. Sumberdaya Manusia.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	7
B. Rencana Kerja Tahun 2024.....	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Analisis Capaian Kinerja.....	16
C. Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahun 2024	14
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
Tabel 3.1 Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja TA 2024	19
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan TA 2024	20
Tabel 3.3 Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Tanjabbar Tahun	22
Tabel 3.4 Evaluasi Unsur IKM Dinas Ketahanan Pangan TA 2024.....	25
Tabel 3.5 IKM Dinas Ketahanan Pangan TA 2024.....	26
Tabel 3.6 Perkembangan Skor PPH Konsumsi Masyarakat dari Tahun 2020 s/d 2024	27
Tabel 3.7 Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dari Tahun 2020 s/d 2024	27
Tabel 3.8 Perkembangan Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2024....	29
Tabel 3.9 Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.....	30
Tabel 3.10 Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.....	31
Tabel 3.11 Perbandingan capaian Cadangan Pangan tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.....	32
Tabel 3.12 Perbandingan capaian Nilai AKIP DKP tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.....	33
Tabel 3.13 Perbandingan capaian Nilai IKM DKP tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.....	33
Tabel 3.14 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan Kinerja...	35
Tabel 3.15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran).....	39
Tabel 3.16 Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja, Tujuan dan Sasaran DKP Kab. Tanjabbar Tahun 2024.....	41
Tabel 3.17 Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2024.....	48

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanaan Aparatur Negara bahwa setiap instansi pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2024 menyusun LKjIP.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain sebagai kewajiban tersebut diatas, juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
2. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan mengacu pada penerapan ketujuh gema revitalisasi pembangunan pertanian. Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2024 untuk mencapai sasaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.429.604.733,- (Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar hukum pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek sasaran strategis organisasi yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam.
2. Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat.
3. Meningkatnya cadangan pangan pemerintah
4. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Ada Beberapa Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kondisi aktual yang mempengaruhi Ketahanan Pangan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berbagai permasalahan terhadap pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, serta kemudahan untuk dikelola.

Isu strategis Dinas Ketahanan Pangan ini dirumuskan melalui Focus Grup Discussion (FGD) di internal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan
2. Penguatan cadangan pangan
3. Penanganan daerah rentan rawan pangan
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat
5. Peningkatan keamanan pangan segar
6. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Kerja. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Bertugas membantu Bupati Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang sekretaris, sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

3. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan, penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang, ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

4. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang distribusi pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan dan pasokan harga, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan penyusunan prognosa neraca pangan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran serta pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

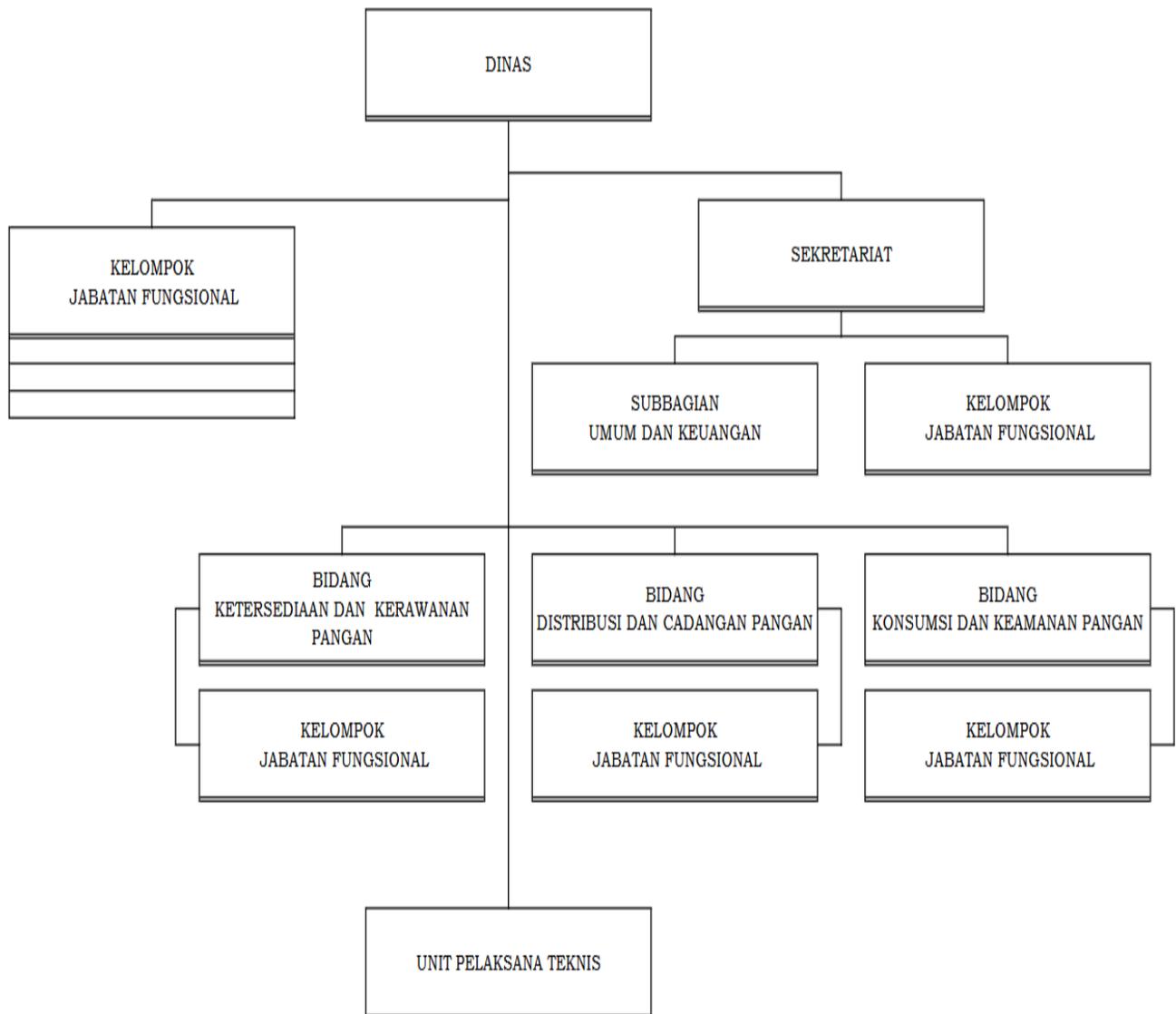
- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, ketahanan pangan keluarga, perhitungan perkomoditas, perkonsumsi energi dan protein masyarakat pertahun, dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan Pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. STRUKTUR ORGANISASI.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maka telah disusun struktur organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur sipil negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negera yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pangan. Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2024 sebanyak 17 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan kepangkatan, serta pendidikan sebagai berikut :

a. Golongan IV, sebanyak 5 Orang terdiri dari :

- Golongan IV/a : 3 Orang
- Golongan IV/b : 1 Orang
- Golongan IV/c : 1 Orang

b. Golongan III, sebanyak 10 Orang terdiri dari :

- Golongan III/a : 2 Orang
- Golongan III/c : 1 Orang
- Golongan III/d : 7 Orang

c. PPPK, sebanyak 2 Orang

Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sarjana (S2), sebanyak 2 Orang
- b. Sarjana (S1), sebanyak 12 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma/DIII) sebanyak 2 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 1 Orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Visi

“Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi ke empat yaitu “Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan”

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Sedangkan tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan di Dinas Ketahanan Pangan yaitu Terselenggaranya tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah (1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam, (2) Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat serta sasaran ke (3) Meningkatnya cadangan pangan pemerintah.

Sedangkan sasaran non urusan Dinas Ketahanan Pangan yaitu Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja.

5. Indikator

Setelah Asistensi dan Pendampingan SAKIP Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai berikut :

Indikator Setelah Asistensi & Pendampingan SAKIP (Desember 2022)	Indikator Setelah Asistensi & Pendampingan SAKIP di Jakarta (Oktober 2023)
<ol style="list-style-type: none"> Indeks Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 	<ol style="list-style-type: none"> Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
<ol style="list-style-type: none"> Persentase penguatan cadangan pangan Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah cadangan pangan Pemerintah
Nilai IKM Nilai AKIP	Nilai IKM Nilai AKIP

6. Strategi, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan strategi, arah kebijakan, dan program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Strategi

Strategi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 adalah :

- Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Rentan Rawan Pangan.
- Peningkatan Sistem, Jaringan Dan Kelembagaan Distribusi Pangan.
- Pengembangan Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
- Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- Mengembangkan kemitraan antara Kelompok Tani dengan Gapoktan dalam rangka membangun Insfrastruktur pangan pendukung kemandirian pangan di Kab. Tanjung Jabung

Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 adalah :

- a. Optimalisasi kegiatan pertanian keluarga, pertanian masuk sekolah, dan pemberdayaan pekarangan.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) serta Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat.
- c. Optimalisasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- d. Gerakan Sosialisasi Promosi dan Penyuluhan tentang Diversifikasi Pangan serta konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
- e. Koordinasi, sosialisasi dan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
- f. Optimalisasi dan Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Lantai Jemur, serta infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

Program

Program-program yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

Pada tahun anggaran 2024, rencana kerja tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2024, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja DKP	Dokumen	6
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD yang disusun	Laporan	1
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	15
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
1.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	284
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan OPD	Unit	6
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	27
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan (%)	Persen	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	Skor	93,00
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pangan	Skor	87,00
3.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka Ketersediaan Energi per Kapita (kkal/kap/hari) Angka Ketersediaan Protein per Kapita (gram/kap/hari)	Kkal/kap/hari Gr/kap/hr	2.400 63
3.1.1	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan	1
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	1
3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	laporan	2
3.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah tonase pengadaan beras cadangan pangan kabupaten	Ton	10
3.2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	10
3.2.2	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	10
3.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) (kkal/kapita/hari) Angka Kecukupan Konsumsi Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	Kkal/kap/hr Gr/kapita/hr	2.100 52
3.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	dokumen	1
3.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	laporan	2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan /beras	Nilai	1,08
4.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Peta	13
4.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1
4.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase daerah rentan rawan pangan kewenangan kabupaten	Persen	9
4.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Laporan	2
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu	Persen	100
5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar	Kegiatan	1
5.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Laporan	2
5.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Bupati yang dituangkan didalam Sasaran Strategis sesuai dengan indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2024. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat. Berikut perjanjian kinerja tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	93,00
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,00
3	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan Kabupaten	40 %
4	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	66,00 78,89

Program	Anggaran	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp	3.588.193.733
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	573.146.000
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	239.917.000
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	28.348.000
TOTAL	Rp	4.429.604.733

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dilaksanakan guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Untuk menilai keberhasilan dan kurangberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja memiliki esensi penting dalam evaluasi kinerja yang berdasarkan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasi visinya.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini:

Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
≥ 85%	Sangat Baik
70% sampai dengan < 85%	Baik
55% sampai dengan < 70%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan diukur dengan cara **“Maximize Target”** yaitu apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Pencapaian dari sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan gambaran umum indikator perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Formulasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	93,00	Skor PPH konsumsi : % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan	Semakin besar capaian skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik (Maximize Target)
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,00	Skor PPH ketersediaan : % Angka Kecukupan Energi (AKE) x Bobot masing-masing kelompok pangan	Semakin besar capaian skor PPH Ketersediaan, maka semakin beragam ketersediaan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik (Maximize Target)
3	Jumlah cadangan pangan Kabupaten	40 %	(Jumlah cadangan pangan kabupaten / 100 ton) x 100 %	Semakin besar capaian persentase Penguatan cadangan pangan kabupaten, maka semakin besar penguatan cadangan pangan kabupaten sehingga capaian kinerja semakin baik pula (Maximize Target)
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan	66,00	Hasil penilaian dari Inspektorat Tanjung Jabung Barat	Semakin besar capaian nilai AKIP maka tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan sangat baik, sehingga capaian kinerja semakin baik pula (Maximize Target)
	Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	78,89	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Semakin besar capaian nilai IKM maka tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public Dinas Ketahanan Pangan sangat baik, sehingga capaian kinerja semakin baik pula (Maximize Target)

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Fisik (%)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	93,00	93,20	Capaian 100 % (Sangat baik)
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,00	76,39	Capaian 87 % (Baik)
3	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan Kabupaten	40 %	115 %	Capaian 280 % (Sangat Baik)
4	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	a. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	66,00	67,52	Capaian 102 % (Sangat Baik)
		b. Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	78,89	80,04	Capaian 101 % (Sangat Baik)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat, 2024

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

B.1) Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2024 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Capaian atas IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis. Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor PPH. Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

Untuk perhitungan Skor PPH konsumsi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2024 berdasarkan survey social ekonomi nasional (susenas) oleh BPS, dari proses penghitungan data oleh bidang konsumsi dan keamanan pangan, didapatkan skor PPH sebesar 93,20. Nilai skor PPH konsumsi masyarakat tahun 2024 ini meningkat dibandingkan dengan skor PPH tahun 2022 yang lalu yaitu sebesar 87,60. Dengan kondisi saat ini menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih masih bisa ditingkatkan, dimana masih tingginya konsumsi kelompok pangan hewani dan minyak/lemak namun masih rendah pada konsumsi gula, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Walaupun demikian, masih ditemui berbagai faktor hambatan di masyarakat dalam mendukung tercapainya target ditahun 2024 antara lain :

- a) Perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi.
- b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan
- c) Kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu
- d) Berbagai bentuk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap bahan pangan inferior.
- e) Belum optimalnya kerjasama antar OPD serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

- a) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyusunan KIT dan modul penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik
- b) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal
- c) Peningkatan konsumsi melalui buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan umbi-umbian yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

Upaya diatas merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH Konsumsi masyarakat. Adapun sub kegiatan yang menjadi pendukung dalam pencapaian target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi masyarakat pada tahun anggaran 2024 yaitu :

➤ *Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan melakukan kegiatan Pelatihan Survei Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) dengan menghadirkan tiga narasumber analisis yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat H. yan Ery, S.Pt., M.Si, Kabid Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ibu Hj. Nelli Rosmawati, S.P., M.Si dan Ibu Aan Jumlianti, S.P selaku Kasi Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dapat menjadi salah satu capaian kinerja serta indikator capaian target kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun secara nasional, hal tersebut dapat tercapai apabila kabupaten memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diketahui skor PPH yang telah dihitung dan dapat diperoleh data yang valid untuk bisa dilakukan evaluasi, perencanaan, serta eksekusi untuk menjadi solusi dalam problem ketahanan pangan kedepannya.

Berikut beberapa dokumentasi dari sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun



➤ Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sebagai sub kegiatan pendukung pencapaian skor pola pangan harapan konsumsi masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi, Meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan lokal yang beragam dan berkelanjutan, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi.

Bentuk dari sub kegiatan ini adalah pemberian hibah berupa benih tanaman dan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) dan juga Pelatihan bimbingan teknis kelompok untuk menambah wawasan Pengolahan Lahan Tanaman Hortikultura serta Penanganan Hama dan Penyakit Pada Tanaman Hortikultura kepada 3 Kelompok Wanita Tani yaitu KWT Melati Desa Bram Itam Raya Kec. Bram Itam, KWT Mekar Tanjung Desa Mekar Tanjung Kec. Bram Itam, dan KWT Bunga Anggrek Desa Makmur Jaya Kecamatan Betara. Selain pemberian hibah kepada Kelompok wanita tani ini, dilaksanakan juga kegiatan pelatihan pengolahan pangan lokal.

Berikut beberapa dokumentasi dari sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal





b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Berdasarkan neraca bahan makanan (NBM) kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024, maka pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan AKE sebesar 2.400 Kkal/kapita/hari (WNPX 2012) dapat disusun seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	807	33,6	0,5	16,81	16,81	25,0	-
2.	Umbi-umbian	72	3,0	0,5	1,50	1,50	2,5	-
3.	Pangan Hewani	1.736	72,3	2,0	144,67	24,00	24,0	+
4.	Minyak dan Lemak	1.294	53,9	0,5	26,96	5,00	5,0	+
5.	Buah/biji berminyak	731	30,4	0,5	15,22	1,00	1,0	+
6.	Kacang-kacangan	72	3,0	2,0	6,00	6,00	10,0	-
7.	Gula	140	5,8	0,5	2,92	2,50	2,5	+
8.	Sayuran dan buah	94	3,9	5,0	19,59	19,59	30,0	-
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.946	206,1		233,66	76,39	100,0	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat (2024)

Skor PPH ketersediaan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2024, dari proses penghitungan data oleh bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, didapatkan skor PPH sebesar 76,39. Dari 8 kelompok bahan pangan sebagai komponen penyusun PPH, empat kelompok bahan pangan yang telah memenuhi bahkan sangat signifikan melampaui skor PPH maksimal yaitu kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, serta gula sedangkan kelompok bahan pangan lainnya masih belum mampu untuk mencapai skor PPH maksimal yang diharapkan.

Kelompok padi-padian meskipun belum mencapai skor PPH maksimal karena turunnya produksi Beras lokal mengingat potensi Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu sentra beras di provinsi Jambi tentunya berpeluang untuk peningkatan produksi beras lebih maksimal lagi. Untuk kelompok umbi-umbian skor PPH yang dicapai hanya 1,50 masih terlalu kecil untuk mencapai skor PPH maksimal sebesar 2,5.

kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian wilayahnya meliputi daerah perairan yang tentunya berpeluang sebagai penghasil/penyedia komoditi ikan, begitu pula masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang juga berpeluang sebagai penghasil komoditi peternakan, pada tabel 3.3 menunjukkan skor riil PPH dari kelompok pangan hewani sebesar 144,67 melebihi skor PPH yang dianjurkan yakni 24,0. Pada kelompok pangan hewani, daging menyumbang ketersediaan energi sebesar 1.814 Kkal/kapita/hari, ikan 38 Kkal/kapita/hari, telur sebesar 10 Kkal/kapita/hari, dan susu hanya 4 Kkal/kapita/hari, dengan persentase AKE 72,3 %.

Untuk kontribusi ketersediaan kelompok sayuran dan buah serta umbi-umbian masih rendah. Untuk umbi-umbian skor PPH ketersediaan yang diperoleh adalah 1,6 dari skor maksimal yaitu 2,5 selain itu, sayur dan buah juga memperoleh skor PPH ketersediaan yang masih rendah yaitu 21,4 dari skor maksimal sebesar 30,00. Dari hasil tersebut seharusnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat meningkatkan produksi umbi-umbian dan sayuran produksi petani lokal mengingat sebagian besar areal pertanian di kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dimanfaatkan untuk komoditi hortikultura.

Adapun sub kegiatan yang menjadi pendukung dalam pencapaian target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi masyarakat pada tahun anggaran 2024 yaitu :

➤ Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Langkah-langkah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan yaitu :

1. *Pengumpulan data* : Mengumpulkan data tentang produksi, impor, ekspor, dan stok bahan makanan.
2. *Penghitungan ketersediaan* : Menghitung ketersediaan bahan makanan dengan menggunakan rumus: $Ketersediaan = Produksi + Impor - Ekspor +/- Stok$.
3. *Penghitungan kebutuhan* : Menghitung kebutuhan bahan makanan berdasarkan jumlah penduduk, pola konsumsi, dan kebutuhan gizi.
4. *Analisis neraca* : Menganalisis neraca bahan makanan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan bahan makanan.
5. *Identifikasi defisit/surplus* : Mengidentifikasi apakah ada defisit atau surplus bahan makanan di wilayah atau negara tersebut.

Berikut beberapa dokumentasi dari sub kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan



➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang juga merupakan arahan dari Badan Pangan Nasional sebanyak 2 kali pelaksanaan. Acara ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta Natal/Tahun Baru. Gerakan Pangan Murah ini melibatkan sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan, TP-PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bank Jambi, Bulog, serta distributor lokal. Tujuan utamanya adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk membeli sembako dengan harga lebih terjangkau.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah sembako dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Berikut daftar harga sembako dalam Gerakan Pangan Murah, Beras SPHP (Rp60.000), Gula Pasir (Rp18.000/kg), Minyak Goreng (Rp15.500/liter), Cabe Merah Keriting (Rp23.000/½ kg), Bawang Merah (Rp18.000/½ kg), Bawang Putih (Rp18.000/½ kg), Telur Ayam Ras (Rp15.000/10 butir), Daging Beku: (Rp105.000), makanan olahan mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000,-

Selain kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Dinas Ketahanan Pangan juga melaksanakan kegiatan Pemantauan distribusi dan harga pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di pasar yang berlokasi di dua Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Bram Itam. Tujuan Pemantauan Harga Pangan yaitu 1) Meningkatkan sistem pemantauan ketersediaan, distribusi, dan harga pangan, 2) Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta 3) Mengantisipasi gejolak harga pangan.

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis :





➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten_Kota

Dinas Ketahanan Pangan melalui Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan Program Kegiatan “Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS)” di 3 lokasi Sekolah Dasar. Hal ini dilakukan menindaklanjuti hasil dari peta kerawanan pangan dan kerentanan pangan / FSVA tahun 2023 di wilayah prioritas 1 (satu) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini dimulai dengan pemberian sarapan kepada siswa, penyampaian laporan pelaksana kegiatan, sambutan Kepala Sekolah, Sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang makanan bergizi oleh Dinas Kesehatan, dan dilanjutkan dengan pemberian makanan bergizi berupa susu, buah, dan roti serta pelaksanaan lomba mewarnai oleh siswa.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan pemberian edukasi tentang pangan yang mengandung gizi yang dapat mendukung pertumbuhan dan kesehatan siswa. Pada kesempatan tersebut turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pihak Kecamatan, serta Ahli Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pihak Sekolah Dasar.

Pada tahun 2024 kegiatan GENIUS ini dilaksanakan di tiga Sekolah Dasar di tiga kecamatan yaitu SDN 12/V Desa Betara Kanan, SDN 152/V Desa Betara Kiri, dan SDN 189/V Kuala Indah. Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan GENIUS ini :





dgp.tanjabbarkab.go.id [Dkp Tanjabbarat](https://www.facebook.com/Dkp.Tanjabbarat) [@dkp_tanjabbarat](https://www.instagram.com/dkp_tanjabbarat)

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

STOP
BOROS
PANGAN

c. Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten

Keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian bencana. Dalam kondisi darurat bencana, proses penyaluran CPPD lebih ringkas karena bantuan pangan dapat langsung diberikan kepada masyarakat terdampak melalui instruksi pimpinan daerah. Pemanfaatan Cadangan Pangan Beras Pemerintah Kabupaten digunakan untuk :

- a. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu.
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana.
- d. Rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal. Pada tahun 2024 stok awal CPPD di Bulan Januari 2024 sebanyak 22,646 ton beras dan di Bulan Mei 2024 ada penambahan CPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 20 ton beras. Sesuai pengajuan dari kecamatan dan instruksi kepala daerah untuk bantuan pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2024 telah tersalurkan beras CPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 1,224 ton beras. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal Per Desember tahun 2024 adalah 41,422 ton beras.

Penetapan jumlah cadangan pangan Beras Pemerintah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 sebesar 35,76 ton beras. Jadi persentase jumlah cadangan beras Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebesar 115,83 %

$$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota Yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\frac{41,422}{35,76} \times 100\% = 115,83 \%$$

Adapun sub kegiatan yang menjadi pendukung dalam pencapaian target jumlah cadangan pangan pada tahun anggaran 2024 yaitu :

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah daerah sebesar 1, 224 ton beras yang dikeluarkan ke beberapa lokasi pasca bencana alam maupun bencana kebakaran.

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan/ penyaluran cadangan pangan pemerintah



d. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau sering pula disebut Sistem AKIP merupakan sebuah sistem perencanaan kinerja yang membentuk siklus penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dan tercantum dalam perencanaan strategis organisasi.

Proses tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan kinerja tahunan, untuk kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data penilaian kinerja, analisis, review dan pelaporan kinerja serta penggunaan data kinerja tersebut bagi perbaikan kinerja organisasi di periode berikutnya. nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil penilaian inspektorat tahun 2024 mendapat nilai 67,52 atau kategori B.

e. Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan

a. Deskripsi Responden

Hasil pengisian formulir secara online dan offline survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di inspektorat yang digunakan terdapat sebanyak 38 responden yang sudah mengisi formulir tersebut, yang terdiri dari 23 responden laki-laki dan 15 perempuan. Jadi laki-laki lebih dominan dari pada perempuan yang mengisi survei tersebut. Selanjutnya dilihat dari aspek pekerjaan responden terdapat diantaranya 23 orang PNS, 8 orang honorer, 3 orang wirausahawan dan 4 orang lainnya memilih "lainnya" pada kolom pekerjaan, sesuai dengan tabel berikut :

Tabel Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan jenis kelamin

	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	23	15	38

Tabel. Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan			Total
	SMA	S1	S2	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	14	23	1	38

Tabel Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pekerjaan

	Pekerjaan					Total
	PNS	SWASTA	WIRUSAHA	HONORER	PETANI	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	23	2	3	6	4	38

b. Evaluasi Unsur

Hasil pengisian kuesioner survei evaluasi unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan ada tujuh unsur pelayanan, yakni persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, serta pengaduan, saran dan masukan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Pada survei ini hanya unsur biaya /tarif yang mendapatkan penilaian sangat baik dari masyarakat, sedangkan unsur sarana dan prasarana mendapatkan penilaian kurang baik dari masyarakat.

Tabel 3.4. Evaluasi unsur IKM Dinas Ketahanan Pangan

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 25	Keterangan
U1	Persyaratan	3,18	79,61	Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,11	77,63	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3,16	78,95	Baik
U4	Biaya/tarif	3,74	93,42	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,21	80,26	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,16	78,95	Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,32	82,89	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	2,92	73,03	Kurang Baik
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,32	82,89	Baik

Hasil uraian dan tabel diatas merekomendasikan bahwa meskipun banyak unsur pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan telah dinilai baik, unsur-unsur pelayanan tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar menjadi sangat baik. Hal tersebut agar unsur-unsur itu bisa mencapai nilai sangat baik sebagaimana unsur biaya/tarif. Sementara itu, unsur sarana dan prasarana mendesak untuk ditingkatkan agar menjadi sangat baik atau setidaknya baik.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil akumulasi Nilai Rata-rata (NRR) Tertimbang dan Nilai Indeks pelayanan publik di Unit Dinas Ketahanan Pangan terdapat enam unsur pelayanan dinilai baik, dan satu unsur dinilai kurang baik oleh masyarakat. Setelah akumulasi Nilai Rata-Rata Tertimbang, Nilai Indeks Pelayanan sebesar 3,20 dan setelah konversi menjadi 80,04. Kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dinilai "BAIK" oleh masyarakat yang telah mendapat pelayanan di unit tersebut sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5. IKM Dinas Ketahanan Pangan

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,18	0,35
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,11	0,34
U3	Waktu Penyelesaian	3,16	0,35
U4	Biaya/tarif	3,74	0,41
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,21	0,35
U6	Kompetensi pelaksana	3,16	0,35
U7	Perilaku pelaksana	3,32	0,36
U8	Sarana dan Prasarana	2,92	0,32
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,32	0,36
Nilai Indeks (NI)			3,20
Nilai Indeks setelah konversi			80,04
Kinerja Unit Pelayanan			Baik

B. 2) Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu/sebelumnya adalah berikut ini :

a. Skor PPH Konsumsi Masyarakat

Dibawah ini dapat dilihat tabel capaian keberhasilan Skor PPH tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perkembangan Skor PPH Konsumsi Masyarakat dari Tahun 2020 s/d 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	85,00	94,50	90,00	90,00	91,00	91,00	92,00	87,60	93,00	93,20

Sumber : Data BPS diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Tabel 3.6 diatas menunjukkan bahwa situasi konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 tahun terakhir 2020 – 2024 memiliki tren fluktuatif. Adanya perubahan situasi global akibat perubahan iklim, Pandemi Covid-19, situasi geopolitik dunia, dan disrupsi pasokan pangan menjadi pendorong adanya krisis pangan. Selanjutnya, hal ini akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat

Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator pembangunan pangan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 pada Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, dengan target capaian skor PPH Konsumsi Nasional 95,2 pada tahun 2024. PPH diukur agar dapat digunakan sebagai basis data untuk mengetahui angka kebutuhan pangan dalam perencanaan pembangunan pangan berdasarkan potensi dan kearifan lokal. Kualitas konsumsi pangan menjadi salah satu indikator global dan nasional untuk menilai pemenuhan konsumsi pangan berdasarkan standar kecukupan gizi. Skor PPH yang ideal perlu dihitung dengan cermat agar kebijakan dalam mengambil langkah strategis juga tepat. Proyeksi skor PPH pada setiap kelompok pangan maupun secara total perlu dilakukan setiap tahun.

b. Skor PPH ketersediaan

Tabel 3.7 Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dari Tahun 2020 s/d 2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Skor Pola Pangan (PPH) Ketersediaan	79,00	79,46	81,00	89,55	83,00	80,51	85,00	69,11	87,00	76,39

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Memperhatikan tabel Neraca Bahan Makanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa jumlah dan keberagaman pangan yang tersedia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat berfluktuasi. Potensi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan dan perikanan perlu dioptimalkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meski demikian masih ada beberapa komoditi pangan strategis yang diperoleh dari luar daerah seperti tepung terigu, tepung gandum, gula pasir, kacang kedelai, kentang, daging ayam kampung, susu sapi, telur ayam kampung, serta minyak goreng. Pangan strategis yang tidak dapat di produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau produksinya rendah ini perlu dijaga kestabilan pasokan pangannya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menjamin dan menjaga pasokan pangan strategis yang stabil dari berbagai daerah sekitar.

c. Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal. Pada tahun 2024 stok awal CPPD di Bulan Januari 2024 sebanyak 22,646 ton beras dan di Bulan Mei 2024 ada penambahan CPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 20 ton beras. Sesuai pengajuan dari kecamatan dan instruksi kepala daerah untuk bantuan pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2024 telah tersalurkan beras CPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 1,224 ton beras. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal Per Desember tahun 2024 adalah 41,422 ton beras.

Penetapan jumlah cadangan pangan Beras Pemerintah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 sebesar 35,76 ton beras. Jadi persentase jumlah cadangan beras Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebesar 115,83 %.

Keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian bencana. Dalam kondisi darurat bencana, proses penyaluran CPPD lebih ringkas karena bantuan pangan dapat langsung diberikan kepada masyarakat terdampak melalui instruksi pimpinan daerah. Pemanfaatan Cadangan Pangan Beras Pemerintah Kabupaten digunakan untuk :

- a. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu.
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana.
- d. Rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Untuk menghindari kekosongan stok beras CPPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, diharapkan setiap tahun anggaran dapat dianggarkan untuk penambahan beras CPPD sesuai dengan Surat Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah dari Gubernur Provinsi Jambi. Upaya yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pemecahan permasalahan yaitu tersedianya anggaran pemerintah daerah dari APBD II melalui Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat Bidang distribusi dan cadangan pangan untuk pengadaan beras CPPD yang bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal.

d. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

Untuk melihat perkembangan nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.8 Perkembangan Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2024

Uraian	2021		2022		2023		2024		2026
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan	65,04	61,66	65,55	65,47	65,90	66,17	66,00	67,52	66,85

Sumber : Inspektorat Kab. Tanjab Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil penilaian inspektorat tahun 2024 mendapat nilai 67,52 atau kategori B. Nilai ini ada peningkatan dibanding penilaian tahun 2023 yang lalu. Dengan adanya evaluasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap agar kinerja perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat lebih ditingkatkan. Sesuai dengan hasil rekomendasi dari tim Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan perbaikan tindak lanjut sehingga tercipta penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien agar sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang dinaungkan Kementrian PAN-RB dan target nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dapat mencapai target yang telah ditetapkan didalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode 2021-2026.

B.3) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu pada tabulasi target jangka menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021 s/d 2026, sebagaimana pada tabel di bawah ini :

a. Skor PPH Konsumsi Masyarakat

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja Skor PPH Konsumsi tahun 2024 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026

Uraian	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	93,00	93,20	95,20

Sumber : Data BPS diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, realisasi Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Masyarakat yaitu 93,20 dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026, maka capaian targetnya sebesar 98 % atau dapat dikategorikan sangat baik.

Guna mencapai target realisasi skor PPH ditahun 2026 perlu digencarkan salah satunya melalui sosialisasi kegiatan gerakan pangan non beras non terigu, beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) kepada masyarakat khususnya siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah serta para guru dan kepala sekolah. Sosialisasi ini sangat penting, bahwa pangan itu bukan hanya beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat, tapi terdapat jenis pangan lain seperti jagung, sagu, singkong, ubi jalar, sukun, sorghum, serta umbi-umbian lain. Gerakan sosialisasi konsumsi pangan lokal non beras kepada para siswa SD/MI kelompok usia anak-anak, sehingga saat dewasa sudah terbiasa mengkonsumsi makanan non beras dan non tepung terigu.

Program kegiatan gerakan pangan non beras non terigu, beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), membutuhkan waktu untuk mengubah perilaku masyarakat agar beralih mengonsumsi pangan ke bahan pangan non beras dan non terigu. Keterlibatan pemangku kepentingan antara lain para pelaku UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan turut mendukung gerakan tersebut dengan menciptakan kreasi masakan berbahan non beras dan terigu, seperti dari talas, singkong dan jagung, sehingga nantinya akan muncul kuliner dari bahan jagung, sagu, singkong, ubi jalar, sukun, sorghum, serta umbi-umbian lain.

Menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui: 1) Peningkatan aktivitas fisik; 2) Peningkatan perilaku hidup sehat; 3) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; 4) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; 5) Peningkatan kualitas lingkungan; dan 6) Peningkatan edukasi hidup sehat.

Program perbaikan konsumsi pangan harus diawali sejak aspek hulu yakni ketersediaan pangan, distribusi pangan, hingga hilir yaitu konsumsi pangan. Upaya perbaikan konsumsi pangan harus dilakukan bersama-sama oleh SKPD terkait bersama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat maupun media dengan peran masing-masing. Bappeda berperan sebagai pengawal program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD/Renja masing-masing SKPD sedangkan Dinas Ketahanan Pangan berperan sebagai focal point yaitu SKPD kunci.

b. Skor PPH Ketersediaan

Untuk perbandingan realisasi capaian skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan daerah tahun 2024 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan capaian Skor PPH Ketersediaan tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026

Uraian	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,00	76,39	90,00

Sumber : Dinas Instansi Terkait diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Dalam Prasetyarini dkk (2014), dijelaskan bahwa Skor PPH < 100 artinya tidak ideal dimana kualitas ketersediaan pangan masih rendah. Berdasarkan dengan pernyataan tersebut dan melihat skor PPH Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 masih dibawah 100 maka perlu adanya peningkatan keberagaman atau diversifikasi pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam mencapai skor PPH yang ideal, maka kelompok pangan yang melebihi skor PPH maksimal, PPH sebaiknya dilakukan pengolahan produk turunan sedangkan kelompok pangan yang memiliki skor aktual lebih rendah dari pada skor PPH perlu dilakukan peningkatan produksi. Penurunan tersebut dapat dilakukan dengan membuat diversifikasi produk olahan turunan sehingga dapat meningkatkan nilai tawar dan dapat dipasarkan keluar Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara untuk peningkatan komoditas kelompok pangan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah produksi atau bila tidak memungkinkan untuk meningkatkan jumlah produksi dalam daerah maka bisa melakukan peningkatan impor pangan dari daerah lain.

Selain itu Dengan berbagai upaya penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengoptimalkan penganekaragaman pangan, meningkatkan kemampuan penyediaan bahan pangan pokok selain beras untuk dapat memenuhi konsumsi pangan yang beragam, memfasilitasi dan dukungan kebijakan bagi pengembangan industri pengolahan bahan pangan lokal serta infrastruktur pemasaran untuk meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat, meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keunggulan produk pangan lokal dan pola konsumsi hidup sehat dengan memanfaatkan potensi sumber pangan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta meminimalisir tingkat kehilangan hasil produksi melalui penanganan pascapanen pada proses penggilingan dan transportasi.

c. *Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten*

Untuk perbandingan realisasi capaian persentase jumlah cadangan kabupaten tahun 2024 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan capaian Cadangan Pangan Kabupaten tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026

Uraian	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten	40 %	115 %	60 %

Sumber : BULOG diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal Per Desember tahun 2024 adalah 41,422 ton beras. Sedangkan berdasarkan Penetapan jumlah cadangan pangan Beras Pemerintah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 sebesar 35,76 ton beras. Jadi persentase jumlah cadangan beras Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 115,83 % sudah melebihi target di tahun 2024 maupun target akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan sebesar 60 %.

Namun Untuk menghindari kekosongan stok beras CPPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, diharapkan setiap tahun anggaran dapat dianggarkan untuk penambahan beras CPPD sesuai dengan Surat Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah dari Gubernur Provinsi Jambi. Upaya yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pemecahan permasalahan yaitu tersedianya anggaran pemerintah daerah dari APBD II melalui Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat Bidang distribusi dan cadangan pangan untuk pengadaan beras CPPD yang bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal.

d. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

Untuk melihat perkembangan nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.12 Perbandingan Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026

Uraian	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan	66,00	67,52	66,85

Sumber : Inspektorat Kab. Tanjab Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil penilaian inspektorat tahun 2024 mendapat nilai 67,52 atau kategori B. Nilai ini ada peningkatan dibanding dengan target akhir periode 2026 yaitu 66,85. Dengan adanya evaluasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap agar kinerja perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat lebih ditingkatkan. Sesuai dengan hasil rekomendasi dari tim Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan perbaikan tindak lanjut sehingga tercipta penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien agar sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang dinaungkan Kementerian PAN-RB dan target nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dapat mencapai target yang telah ditetapkan didalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode 2021-2026.

e. Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan

Untuk melihat perkembangan nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.13 Perbandingan Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra

Uraian	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Ketahanan Pangan	78,89	80,04	79,45

Sumber : Inspektorat Kab. Tanjab Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Hasil akumulasi Nilai Rata-rata (NRR) Tertimbang dan Nilai Indeks pelayanan publik di Unit Dinas Ketahanan Pangan terdapat enam unsur pelayanan dinilai baik, dan satu unsur dinilai kurang baik oleh masyarakat. Setelah akumulasi Nilai Rata-Rata Tertimbang, Nilai Indeks Pelayanan sebesar 3,20 dan setelah konversi menjadi 80,04. Kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dinilai "BAIK" oleh masyarakat yang telah mendapat pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan. Capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat ditahun 2024 ini sudah melebihi target untuk tahun 2026.

Meskipun banyak unsur pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan telah dinilai baik, unsur-unsur pelayanan tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar menjadi sangat baik. Hal tersebut agar unsur-unsur itu bisa mencapai nilai sangat baik sebagaimana unsur biaya/tarif. Sementara itu, unsur sarana dan prasarana kantor yang mendapat penilaian kurang baik dari masyarakat mendesak untuk ditingkatkan agar menjadi sangat baik atau setidaknya baik.

B.4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pengukuran Pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan merupakan hasil kerja dari suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi, yaitu:

- a. Subsistem ketersediaan, yaitu pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan. Ketersediaan pangan menyangkut masalah produksi, stok, impor dan ekspor, yang harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan sebagian bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, pangan yang tersedia bagi keluarga harus cukup volume dan jenisnya, serta stabil dari waktu ke waktu.
- b. Subsistem distribusi, yaitu mencakup upaya memperlancar proses peredaran pangan antar wilayah dan antar waktu serta stabilitas harga pangan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya akses masyarakat terhadap pangan yang cukup. Surplus pangan tingkat wilayah, belum menjamin kecukupan pangan bagi individu/masyarakatnya.
- c. Subsistem konsumsi, yaitu menyangkut pendidikan masyarakat agar mempunyai pengetahuan gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsi individu secara optimal sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Konsumsi pangan tanpa memperhatikan asupan zat gizi yang cukup dan berimbang tidak efektif bagi pembentukan manusia yang sehat, daya tahan tubuh yang baik, cerdas dan produktif.

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis	Solusi
1	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	93,00	93,20	100 %	Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)	-
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,00	76,39	87 %	Masih kurangnya ketersediaan bahan pangan dari kelompok/jenis pangan dibandingkan dengan tingkat konsumsi masyarakat terutama dari produksi lokal Kabupaten Tanjab Barat. Adapun beberapa bahan pangan tersebut yaitu beras, daging ruminansia, telur, kacang hijau, dan sayur	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk membantu ketersediaan dan distribusi bahan pangan ke masyarakat
3	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan Kabupaten	40 %	115 %	280 %	Dukungan dana APBD II TA 2024 dalam pengadaan beras untuk Cadangan Pangan	-
4	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	66,00	67,52	102 %	Terdapat peningkatan capaian kinerja	-
		Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	78,89	80,04	101 %	Terdapat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	-

Dari tabel 3.14 di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sangat baik. Indikator Sasaran I (pertama) berupa Skor PPH konsumsi tingkat capaiannya 100%, hal tersebut karena adanya program pemerintah terkait diversifikasi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dan semakin kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Untuk indikator Sasaran 3 (tiga) berupa Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten tingkat capaiannya 280%, hal tersebut karena adanya Dukungan dana APBD II TA 2024 dalam pengadaan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk indikator Sasaran 4 (empat) berupa Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan tingkat capaiannya adalah 102 % karena adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja ini berupa kelengkapan data yang semakin baik dan peningkatan kualitas dokumen yang dihasilkan, dan indikator sasaran 5 (lima) berupa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Dinas Ketahanan Pangan, tingkat capaiannya kinerjanya adalah 101 % karena adanya peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat.

Selain itu untuk sasaran 2 (Dua) yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan capaian hanya terealisasi sebesar 87 %. Belum tercapainya sasaran ini dikarenakan Masih kurangnya ketersediaan bahan pangan dari kelompok/jenis pangan dibandingkan dengan tingkat konsumsi masyarakat terutama dari produksi lokal Kabupaten Tanjab Barat. Adapun beberapa bahan pangan tersebut yaitu beras, daging ruminansia, telur, kacang hijau, dan sayur.

B.5) Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 dengan dukungan sumber daya aparatur sipil negara sebanyak 17 orang dan sarana prasarana terutama gedung kantor yang dirasakan kurang akan dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari segi efisiensi sumber daya yang ada rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya ada masih dirasakan kurang.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2024 adalah dibagi dalam 4 program yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program / Sub Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024. Program /Sub Kegiatan prioritas tersebut adalah :

a) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Penyusunan Neraca Bahan Makanan
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

b) Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

c) Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2024, adalah :

d) *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 3.15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	93,00	93,20	100 %	198.046.800	195.300.800	98,61 %	101,41
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,00	76,39	87 %	393.122.200	378.820.450	96,36 %	90,28
3	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan Kabupaten	40 %	115 %	280 %	250.242.000	241.518.100	96,51 %	103,62
4	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	a. Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	66,00	67,52	102 %	3.588.193.733	3.477.373.426	96,91 %	105,25
		b. Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	78,89	80,04	101 %				

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran, maka dapat dilihat pada tabel 3.11 bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi masyarakat dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 98,61 % menunjukkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 101,41 % dengan capaian kinerja yang sudah mencapai target yang ditentukan yaitu baik.
- 2) Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan dengan capaian kinerja 87 % dan capaian anggaran 96,36% menunjukkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 90,28 % dengan capaian kinerja yang sudah mencapai target yang ditentukan.
- 3) Indikator Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten dengan capaian kinerja 100 % dan capaian anggaran 96,51 % menunjukkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 103,62 % dengan capaian kinerja yang sudah mencapai target yang ditentukan.
- 4) Indikator Nilai SAKIP dan Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan dengan capaian kinerja 102 % dan capaian anggaran 96,91 % menunjukkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 105,25 % dengan capaian kinerja yang sudah mencapai target yang ditentukan.

B.6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja ditunjang juga dari Program atau Kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, adapun capaian kinerja dari program/kegiatan tersebut tersaji dalam Tabel 3.16. berikut :

Tabel 3.16 Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	100	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi masyarakat	93,00	93,20	100	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE)	2.100 kkal/kap/hr	1.997 kkal/kap/hr	95	Menunjang
				Angka Kecukupan Konsumsi Protein (AKP)	52 gr/kap/hr	58,6 gr/kap	112	Menunjang
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu	80 %	80 %	100	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Menunjang
Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	87,00	76,39	87	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka Ketersediaan Energi per Kapita	2.400 kkal/kap/hari	4.891 kkal/kap/hari	203	Menunjang
				Angka Ketersediaan Protein per Kapita	63 gram/kap/hr	162,33 Gr/kap/hr	257	Menunjang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan /beras	1,08	0,83	83	Menunjang
			Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	1 Peta	1 Peta	100	Menunjang
			Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase daerah rentan rawan pangan kewenangan kabupaten	10 %	4 %	40	Menunjang
Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan Kabupaten	280	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	87,00	76,39	87	Menunjang
			Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah tonase pengadaan beras cadangan pangan kabupaten	10 ton	20 ton	200	Menunjang
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	102 101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	100 %	100	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja DKP	6 Dokumen	6 Dokumen	100	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan	100 %	100 %	100	Menunjang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	100 %	100 %	100	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan OPD	36 Unit	36 Unit	100	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan	100 %	100 %	100	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD Dinas Ketahanan Pangan	100 %	100 %	100	Menunjang

Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat, Dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat, ditunjang dengan program :

a. **Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu *kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.*

Dalam kegiatan ini terdapat indikator 1) Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) dengan target 2.100 kkal/kap/hari telah terealisasi 1.997 kkal/kap/hari, dan indikator 2) Angka Kecukupan Konsumsi Protein (AKP) dengan target 52 gr/kap/hari telah terealisasi 58,6 gr/kap/hari atau rata2 persentase target kegiatan tercapai diatas 95 % sangat mendukung terlaksananya keberagaman konsumsi masyarakat.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh 2 Sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun, dengan pagu anggaran Rp. 17.997.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 17.747.800,-
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan pagu anggaran Rp. 151.701.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 149.980.000,-

b. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**, dengan kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu *Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*

Dalam kegiatan ini terdapat indikator Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar dengan target 1 kegiatan telah terealisasi 1 kegiatan tersebut, atau realisasi tercapai 100 %.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh 2 Sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan pagu anggaran Rp. 20.024.000,- dengan realisasi anggaran 19.724.000,-
- Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, dengan pagu anggaran 8.324.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.849.000,-

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam, Dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan,

ditunjang dengan program :

- a) **Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu *Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.*

Dalam kegiatan ini terdapat indikator 1) Angka Ketersediaan Energi per Kapita dengan target 2.400 kkal/kap/hari telah terealisasi 4.891 kkal/kap/hari, dan indikator 2) Angka Ketersediaan Protein per Kapita dengan target 63 gram/kap/hr telah terealisasi 162,33 gr/kap/hari atau rata2 persentase target kegiatan tercapai diatas 200 % sangat mendukung terlaksananya ketersediaan pangan.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh 3 Sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp. 24.515.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.580.000,-
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Pokok Strategis, dengan pagu anggaran 84.586.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 84.567.250,-
- Penyusunan Neraca Bahan Makanan, dengan pagu anggaran Rp. 44.104.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 40.674.200,-

- b) **Program Penanganan Kerawanan Pangan**, dengan 2 kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu

➤ *Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*

Dalam kegiatan ini terdapat indikator Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan dengan target 1 peta telah terealisasi 1 peta.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh Sub kegiatan yaitu Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, dengan pagu anggaran Rp. 44.678.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 43.178.000,-

➤ *Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*

Dalam kegiatan ini terdapat indikator Persentase daerah rentan rawan pangan kewenangan kabupaten dengan target 10 % telah terealisasi 4 %.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh Sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 195.239.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 189.821.000,-

Sasaran 3 : Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah, Dengan indikator Jumlah cadangan pangan Kabupaten,

ditunjang dengan program :

a) **Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu *Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.*

Dalam kegiatan ini terdapat indikator Jumlah tonase pengadaan beras cadangan pangan kabupaten, dengan target 10 ton beras telah terealisasi 20 ton beras.

Indikator kinerja kegiatan tersebut diatas didukung oleh 2 Sub kegiatan yaitu :

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah, dengan pagu anggaran Rp. 237.952.000,- dengan realisasi anggaran 237.898.700,-
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah, dengan pagu anggaran Rp. 12.290.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.619.400,-

Sasaran 4 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja, Dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan,

ditunjang dengan program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan kegiatan yang menunjang kinerja program yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Target dari kegiatan-kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten ini Berhasil tercapai 100% dari target karena telah dilaksanakan dengan baik melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B.7) Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024, didukung APBD sebesar Rp. 4.429.604.733,- (Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, sebesar Rp. 4.257.428.383,- digunakan untuk :
 - Belanja Pegawai Rp. 2.489.788.433,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.649.274.950,-
 - Belanja Hibah Rp. 118.365.000,-
- b. Belanja Modal, sebesar Rp. 172.176.350,- digunakan untuk:
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.172.176.350,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	-
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.328.268.433	2.277.513.095	50.755.338
3		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	161.520.000	156.520.000	5.000.000
4		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.135.000	26.935.000	200.000
5		Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.850.000	1.850.000	-
6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.241.000	3.201.000	40.000
7		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	44.379.250	5.620.750
8		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.900.000	2.050.000	2.850.000
9		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	36.650.800	30.461.000	6.189.800
10		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.207.350	293.137.330	6.070.020
11		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	30.146.000	28.739.000	1.407.000
12		Pengadaan Mebel	17.400.000	17.400.000	-
13		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.298.350	160.120.000	178.350
14		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.440.000	60.000
15		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.000.000	29.043.051	17.956.949
16		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.450.000	235.841.000	609.000
17		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.326.800	159.643.700	8.683.100
18		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.100.000	7.900.000	5.200.000

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
B	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
19		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	24.515.000	20.580.000	3.935.000
20		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	84.586.000	84.567.250	18.750
21		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	44.104.200	40.674.200	3.430.000
22		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	237.952.000	237.898.700	53.300
23		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah	12.290.000	3.619.400	8.670.600
24		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	17.997.800	17.747.800	250.000
25		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	151.701.000	149.980.000	1.721.000
C	Program Penanganan Kerawanan Pangan				
26		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	44.678.000	43.178.000	1.500.000
27		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	195.239.000	189.821.000	5.418.000
D	Program Pengawasan Keamanan Pangan				
28		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	20.024.000	19.724.000	300.000
29		Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	8.324.000	7.849.000	475.000

Apabila ditinjau dari sisi penyerapan, anggaran sebesar Rp. 4.429.604.733,- terserap Rp. 4.293.012.776,- (96,92 %). Sisa anggaran Rp. 136.591.957,- (3,08 %) diantaranya berasal dari:

- a) Sisa gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 55.755.338,-
- b) Sisa optimalisasi harga pembelian ATK dan kertas sebesar Rp. 5.620.750,-
- c) Sisa optimalisasi belanja percetakan kantor sebesar Rp. 6.189.800,-
- d) Sisa pembayaran listrik air telfon sebesar Rp 17.956.949,-
- e) Sisa pembayaran pajak, bea, perizinan kendaraan dinas sebesar Rp. 8.679.900,-
- f) Sisa pembayaran pemeliharaan peralatan kantor sebesar Rp. 5.200.000,-
- g) Serta Optimalisasi kegiatan bidang sebesar Rp. 37.189.220,-

Realisasi serapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 96,92 % dapat dikategorikan Sangat Baik. Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikan sebagai efisien

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian pada bab- bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100 %, hal ini menunjukkan adanya komitmen peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran yang merupakan Capaian Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Capaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat tercapai sebesar 100 % atau kategori Sangat Baik.
- b) Capaian kinerja sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam tercapai sebesar 87% atau kategori Baik.
- c) Capaian kinerja sasaran 3 Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah tercapai sebesar 280 % atau kategori Sangat Baik.
- d) Capaian kinerja sasaran 4 Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja tercapai sebesar 102% atau kategori Sangat Baik.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 ini kami laporkan. Sebagai akhir kata kami beserta segenap Staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengharapakan LKj Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Kuala Tungkal, Februari 2024

KEPALA DINAS,

H. YAN ERY, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 79700930 199703 1 003

